



REPUBLIK INDONESIA

**PIDATO
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**PENGANTAR DAN KETERANGAN PEMERINTAH
ATAS
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN
POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL
TAHUN 2022**

**DI DEPAN RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 20 Mei 2021

**Bismillahirrahmaanirrahiim,
Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,
Selamat pagi, Salam sejahtera bagi kita semua,
Om Swastiastu, Namu Buddhaya,**

Yang saya hormati, Ibu Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

Pertama-tama marilah kita mengagungkan nama Allah SWT, Tuhan Semesta Alam. Segenap jajaran Kementerian Keuangan menyampaikan Selamat Idul Fitri 1442 H bagi yang merayakan, *taqabalallahu minna wa minkum* – mohon maaf lahir dan batin. Semoga hikmat Ramadhan dan Idul Fitri memperteguh keimanan, solidaritas dan membangkitkan daya juang kita sebagai bangsa.

Pengantar dan Keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2022 disusun dalam kondisi ketidakpastian yang luar biasa, akibat pandemi Covid-19 yang masih terus berlangsung. Dokumen ini akan digunakan sebagai bahan Pembicaraan Pendahuluan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2022. Dengan dinamika yang sangat tinggi, kita harus mampu merancang kebijakan fiskal yang fleksibel dan responsif namun tetap akuntabel dan hati-hati.

Pimpinan dan Para Anggota Dewan yang kami hormati,

Telah 14 bulan, semenjak *World Health Organization* (WHO) menyatakan global pandemi Covid-19, jumlah kasus terinfeksi di dunia telah mencapai lebih dari 164 juta orang dan korban meninggal mencapai lebih dari 3,4 juta jiwa. Di Indonesia, jumlah terinfeksi secara kumulatif telah mencapai lebih dari 1,7 juta dengan jumlah meninggal dunia mencapai lebih dari 48 ribu orang.

Untuk mencegah penyebaran infeksi, interaksi antarmanusia dibatasi, kegiatan ibadah diadaptasi, ibadah haji tahun lalu ditiadakan. Bahkan telah setahun, banyak yang bekerja dari rumah, anak-anak sekolah dari rumah, halal bihalal pun dilakukan secara virtual. Keselamatan jiwa bersama memang yang terutama, namun konsekuensinya terhadap perekonomian sungguh sangat berat dan nyata. Sebagian aktivitas ekonomi harus terhenti. Akibatnya, perekonomian Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi 2,1%, jauh lebih rendah dari target semula sebelum pandemi

sebesar 5,3%. Ini berarti bahwa secara nominal perekonomian Indonesia kehilangan kesempatan menciptakan nilai tambah atau mengalami “kerugian” kurang lebih sebesar Rp1.356 triliun.

Dampak pemburukan ekonomi akan jauh lebih besar jika pemerintah tidak melakukan langkah penanganan (*countercyclical*) melalui kebijakan yang luar biasa. APBN 2020 telah bekerja sangat keras untuk melindungi keselamatan jiwa rakyat Indonesia dan melindungi perekonomian dari hantaman dahsyat akibat Covid-19. Belanja Negara meningkat 12,3% mencapai Rp2.593,5 triliun. Sementara Pendapatan Negara menurun -16,0%, karena aktivitas dunia usaha terpukul sangat dalam di satu sisi, dan di sisi lain pemerintah memberikan berbagai insentif perpajakan untuk menolong dunia usaha agar tetap mampu bertahan. Defisit APBN 2020 mencapai 6,1% PDB, tingkat yang belum pernah terjadi dalam kurun waktu dua puluh tahun terakhir. Defisit ini jauh meningkat dibandingkan rancangan awal APBN 2020 yang ditargetkan hanya sebesar 1,76% PDB.

World Economic Outlook (WEO) April 2021 melaporkan bahwa resesi ekonomi dan kenaikan defisit fiskal di tahun 2020 tidak dapat dihindarkan hampir di semua negara. Tahun 2020, perekonomian Amerika Serikat mengalami kontraksi 3,5% dan defisit fiskal mencapai 15,8% PDB. Jepang kontraksi 4,8% dengan defisit 12,6%, Inggris kontraksi 9,9% dengan defisit 13,4%. Sementara di ASEAN, ekonomi Malaysia kontraksi 5,6% disertai defisit 5,1%, Filipina kontraksi 9,5% disertai defisit 5,5% dan ekonomi Singapura kontraksi 5,4% dengan defisit 8,9% PDB.

Sejak Covid-19 menghantam dunia, pemerintah bersama Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan bekerja bahu-membahu dalam mengantisipasi pemburukan ekonomi dan keuangan yang dapat mengancam stabilitas sistem keuangan. Sinergi yang erat antara otoritas kebijakan membuat Indonesia mampu menahan dampak Covid-19 relatif lebih moderat dibandingkan negara-negara di kelompok G20 maupun ASEAN-5. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) disusun dengan sangat cepat, responsif, dan komprehensif. Realisasi program PEN sebesar Rp579,8 triliun di tahun 2020 berhasil memperkuat sistem kesehatan dalam menangani pasien Covid-19, memberi perlindungan sosial pada puluhan juta rumah tangga miskin dan rentan, dan membantu puluhan juta UMKM untuk mampu bertahan. Program ini juga sangat vital dalam mendukung korporasi, Pemerintah Daerah, serta sektor-sektor yang terdampak oleh pandemi.

Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat,

Memasuki tahun 2021 semua negara masih berjuang mengatasi pandemi yang masih menimbulkan gelombang kasus yang melonjak. Di sisi lain, semua negara juga berupaya memulihkan perekonomiannya. Berbagai langkah seperti: tes, lacak, dan isolasi (TLI), peningkatan kapasitas perawatan, penerapan protokol kesehatan, serta pembatasan aktivitas, terus diintensifkan. Program vaksinasi mengalami kemajuan yang signifikan. Indonesia termasuk negara yang cepat dalam memastikan *supply* vaksin yang memadai untuk mencapai target *herd immunity*. Hingga pertengahan Mei, lebih dari 22 juta dosis vaksin telah diberikan pada masyarakat Indonesia. Percepatan pelaksanaan vaksinasi akan terus dilakukan oleh Pemerintah.

Setelah sempat mengalami lonjakan kasus Covid-19 pada awal tahun, pemerintah melakukan langkah pengendalian Covid-19 skala mikro dengan memobilisasi seluruh elemen pemerintahan hingga ke tingkat desa. Dengan penurunan dan pengendalian kasus positif Covid-19, ekonomi dan kegiatan masyarakat berangsur pulih. Hingga Mei 2021, tanda-tanda positif pemulihan ekonomi global mengalami momentum penguatan, namun lonjakan kasus Covid-19 di India yang begitu dramatis dan menjalar ke berbagai belahan dunia tetap menimbulkan bayangan ketidakpastian dan risiko perlemahan ekonomi global datang kembali.

Saat ini, pasar keuangan global cenderung stabil, yang terlihat dari turunnya indeks volatilitas di pasar saham dan pasar obligasi global. Aliran modal ke *emerging markets* terus menunjukkan tren positif. Namun demikian, proyeksi kenaikan inflasi yang meningkat di Amerika Serikat berpotensi mengancam momentum pemulihan ekonomi Amerika Serikat apabila diikuti dengan pengetatan kebijakan moneter oleh *The Fed*. Ini dapat menciptakan efek rambatan (*spillover*), volatilitas dan ketidakpastian di sektor keuangan, serta dinamika arus modal global seperti saat terjadinya *taper tantrum*.

Sementara itu di sektor riil, indikator PMI Manufaktur Global di bulan April 2021 mencapai 55,8. Ini merupakan angka tertinggi sejak April 2010. Indikator *Baltic Dry Index* yang menunjukkan aktivitas perdagangan global juga mencapai level tertinggi sejak Agustus 2019. Harga komoditas global, yang merupakan indikator penting bagi APBN, terus menunjukkan tren kenaikan, bahkan telah lebih tinggi dari level sebelum pandemi. Namun harus diwaspadai bahwa ketidakpastian tetap membayangi harga komoditas dalam jangka menengah, khususnya sangat dipengaruhi oleh

pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang diperkirakan melanjutkan *rebalancing economy*.

IMF memprakirakan pertumbuhan ekonomi global akan mencapai 6,0 persen di tahun 2021 didukung oleh *base-effect* akibat kontraksi ekonomi di tahun 2020. Di tahun 2022, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan menuju trajektori normalnya di kisaran 4,4 persen. Tentunya proyeksi ini sangat tergantung pada kemampuan dunia mengendalikan Covid-19 dan keberhasilan dari vaksinasi global.

Ekonomi Indonesia juga berada pada trajektori pemulihan. Setelah mengalami kontraksi -5,32 persen di Triwulan II 2020, pertumbuhan ekonomi terus berada pada tren perbaikan. Indikator PMI Manufaktur bulan April 2021 mencapai 54,6 yang menunjukkan terjadinya ekspansi selama 6 bulan berturut-turut. Perkembangan positif tersebut menunjukkan adanya sinyal kuat perbaikan pada kondisi bisnis, seiring dengan naiknya permintaan baru, termasuk dari luar negeri. Ekonomi di Triwulan I 2021 terus membaik, walaupun masih mengalami kontraksi -0,74 persen akibat kenaikan kasus Covid-19 di awal tahun 2021 yang menyebabkan dilakukan kembali pengetatan mobilitas, yang berdampak pada tertahannya kegiatan ekonomi terutama konsumsi. Meskipun demikian, seluruh komponen aktivitas perekonomian terus melanjutkan tren pemulihan. Bahkan rilis BPS 5 Mei 2021 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran telah menurun menjadi 6,26% per Februari 2021 dari sebelumnya 7,07% per Agustus 2020.

Berbagai perkembangan indikator menggambarkan momentum pemulihan ekonomi yang menguat, namun ancaman Covid-19 masih membayangi. Pemulihan perekonomian global juga dibayangi risiko kecepatan pemulihan yang tidak sama antarnegara. Negara-negara dengan akses dan kemampuan vaksinasi yang mumpuni serta memiliki sumber daya besar untuk memberikan stimulus diperkirakan dapat pulih lebih cepat. Sedangkan Covid-19 tidak akan bisa diatasi bila semua negara belum mendapat akses vaksin. Oleh karena itu, sangat penting untuk terus membangun solidaritas global agar pemulihan dapat lebih seimbang. Salah satunya adalah dengan memastikan adanya akses vaksin yang merata bagi seluruh negara di dunia.

Kita semua perlu terus menjaga optimisme dengan terjadinya tren pemulihan ini, namun tidak boleh membuat kita lengah bahkan harus tetap waspada karena ketidakpastian masih tinggi. Kerja keras belum selesai.

Ibu, Bapak, Pimpinan dan Para Anggota Dewan yang kami hormati,

Fokus penanganan Covid-19 dan upaya pemulihan ekonomi tidak boleh mengalihkan perhatian kita dari upaya-upaya perbaikan fundamental perekonomian. Indonesia masih memiliki masalah struktural yang harus diatasi, yaitu: kualitas sumber daya manusia, infrastruktur yang belum memadai, produktivitas yang rendah, serta birokrasi, institusi dan regulasi yang tidak efisien, rumit dan belum bebas dari korupsi.

Perbaikan kualitas SDM dan tenaga kerja harus terus-menerus menjadi bagian sentral dalam peningkatan produktivitas maupun daya saing Indonesia. Peningkatan kualitas SDM adalah suatu keharusan dalam memasuki era *knowledge economy* atau era industri 4.0. Hasil Kajian Kementerian Keuangan dan ADB “*Innovate Indonesia: Unlocking Growth through Technological Transformation*” menunjukkan bahwa kemampuan adopsi teknologi dan inovasi berpotensi meningkatkan 0,55% pertumbuhan ekonomi per tahun selama dua dekade ke depan.

Pembangunan infrastruktur juga terus dilanjutkan untuk menutup *gap* infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adopsi teknologi. *G20 Surveillance Note* yang disampaikan pada *Virtual Meeting G-20 Leaders’ Summit*, 21 November 2020 menunjukkan bahwa ½ persen PDB untuk belanja infrastruktur berpotensi mendorong tambahan 1% pertumbuhan ekonomi per tahun dalam empat tahun berikutnya. Asesmen ini kembali menegaskan bahwa realokasi belanja ke arah belanja produktif perlu terus dilanjutkan dan diperkuat. Selain itu, belanja infrastruktur harus diikuti dengan perencanaan dan *procurement* yang baik, transparan dan kompetitif, sehingga kualitas infrastruktur yang dibangun dan dampak *multiplier*-nya dapat maksimal.

Iklm usaha yang kurang kondusif, birokrasi dan regulasi yang rumit dan belum efisien, serta *high-cost economy* menjadi penghambat investasi dan daya saing ekspor. Reformasi birokrasi berbasis kinerja dan efisiensi harus dilakukan di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kondisi Covid-19, yang mengharuskan perubahan cara kerja dengan mengandalkan sistem komunikasi digital, harus dijadikan sebagai momentum perbaikan efisiensi agar Perekonomian Indonesia mampu bertransformasi menuju *knowledge economy*. SDM-nya harus berkualitas, infrastrukturnya harus mendukung, iklim usaha harus dipermudah. Pelaksanaan UU Cipta Kerja untuk kemudahan investasi dan simplifikasi regulasi harus berjalan efektif.

Dengan berbagai langkah reformasi struktural tersebut maka potensi pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan dari level sekitar 5% menjadi level sekitar 6% per tahun.

Komponen produktivitas pada tahun 2020 berkontraksi 5,0% akibat pandemi. Komponen produktivitas ini diharapkan dapat meningkat menjadi sekitar 2,4% per tahun rata-rata dalam lima tahun ke depan, atau lebih tinggi dari rata-rata sepuluh tahun sebelum pandemi yang sebesar 1,6%. Peningkatan investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan juga diharapkan juga akan meningkatkan kontribusi tenaga kerja dan modal/investasi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dengan mempertimbangkan berbagai dinamika, risiko ketidakpastian, potensi pemulihan ekonomi global dan nasional di tahun depan, serta dengan catatan bahwa Covid-19 dapat terus dikendalikan dan fungsi *intermediary* perbankan dapat kembali pulih, didukung oleh kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan sektor keuangan OJK yang kondusif, Pemerintah mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro untuk penyusunan RAPBN 2022 adalah sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi 5,2 - 5,8 persen; inflasi 2,0 - 4,0 persen; tingkat suku bunga SUN 10 Tahun 6,32 - 7,27 persen; nilai tukar Rupiah Rp13.900,00 - Rp15.000,00 per dolar Amerika; harga minyak mentah Indonesia US\$55 - 65 per barel; *lifting* minyak bumi 686 - 726 ribu barel per hari; dan *lifting* gas bumi 1.031 - 1.103 ribu barel setara minyak per hari.

Pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat,

Belajar dari kondisi dinamika dalam penanganan Covid-19 dan dampaknya yang sangat luas, juga tantangan struktural yang harus diatasi dalam perekonomian kita, maka arsitektur kebijakan fiskal harus bersifat antisipatif, responsif, dan pragmatis, namun tetap fokus pada tercapainya tujuan jangka panjang. Kebijakan fiskal telah menjalankan perannya sebagai instrumen utama dalam penanganan Covid-19 dan proses pemulihan ekonomi, khususnya di tahun 2020 dan 2021. Kebijakan fiskal memang harus terus merespon secara cepat dan tepat dinamika perekonomian yang masih dibayangi ketidakpastian yang tinggi. Di saat yang sama, kebijakan fiskal juga harus menjadi instrumen katalis bagi reformasi struktural untuk penguatan daya saing dan produktivitas.

Namun, instrumen APBN memiliki batas sustainabilitas yang risikonya harus dikelola dengan kehati-hatian yang tinggi. Konsolidasi fiskal secara bertahap harus dilakukan dengan baik. Hal ini harus disertai oleh reformasi APBN yang efektif dan konsisten, untuk mengembalikan pengelolaan fiskal ke arah yang lebih sehat, berdaya tahan, dan mampu menjaga stabilitas perekonomian ke depan. Konsolidasi fiskal juga bertujuan meminimalkan *crowding out effect* pada pasar keuangan yang dapat

melemahkan peran investasi swasta yang akan berakibat negatif bagi potensi pertumbuhan dan kesehatan ekonomi jangka panjang. Konsolidasi fiskal merupakan syarat perlu, yang meskipun sulit dan berat, tetapi harus dilakukan. Ini merupakan bentuk disiplin fiskal yang sangat menantang di tengah begitu banyak kebutuhan pembangunan yang sangat mendesak.

Tema kebijakan fiskal tahun 2022 adalah “**Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural**” yang konsisten dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022. Tema kebijakan fiskal tahun 2022 ini memberi penekanan pada **pemantapan pemulihan sosial-ekonomi sebagai penguatan fondasi untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural secara lebih optimal.**

Pertama, melanjutkan upaya pemantapan pemulihan ekonomi, dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan untuk mendorong efektivitas penanganan Covid-19 sebagai kunci pemulihan ekonomi.

Kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial untuk memperkuat fondasi kesejahteraan sosial, mencegah kenaikan kemiskinan dan kerentanan akibat dampak Covid-19, termasuk memperkuat daya ungkit UMKM dan dunia usaha agar mampu bangkit kembali lebih kuat dan berdaya tahan.

Ketiga, mendukung peningkatan produktivitas dengan perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui peningkatan kualitas pendidikan, penguatan sistem kesehatan yang terintegrasi dan handal, serta penguatan program perlindungan sosial sepanjang hayat. Perbaikan daya saing dan produktivitas juga memerlukan investasi infrastruktur ICT, konektivitas, energi dan pangan untuk mendukung transformasi ekonomi. Reformasi struktural ini harus disertai penguatan institusional dan simplifikasi regulasi melalui reformasi birokrasi dan implementasi UU Cipta Kerja.

Keempat, optimalisasi pendapatan, penguatan *spending better* dan inovasi pembiayaan menjadi kunci dalam rangka konsolidasi kebijakan fiskal yang adil dan berkelanjutan. **Upaya optimalisasi pendapatan** ditempuh melalui penggalan potensi, perluasan basis perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan optimalisasi pengelolaan aset serta inovasi layanan. Sehingga, angka *tax ratio* dapat diperbaiki dalam jangka pendek dan menengah untuk mendukung penguatan ruang fiskal.

Dari sisi belanja, **upaya penguatan *spending better*** dilakukan melalui pengendalian belanja agar lebih efisien, lebih produktif, dan menghasilkan *multiplier*

effect yang kuat terhadap perekonomian serta efektif untuk meningkatkan kesejahteraan. Pemanfaatan anggaran harus lebih difokuskan untuk mendukung program prioritas, mendorong efisiensi kebutuhan dasar, dan menjaga agar pelaksanaan anggaran berbasis hasil (*results-based*). Hal ini penting mengingat ruang fiskal semakin menyempit sebagai akibat meningkatnya belanja yang bersifat mengikat (operasional dan birokrasi). Belanja subsidi harus terus ditransformasi dari berbasis komoditas menjadi berbasis orang agar semakin efektif dan tepat sasaran.

Selanjutnya, inovasi di sisi pembiayaan difokuskan untuk mendorong pembiayaan yang fleksibel, *prudent* dan inovatif, melalui upaya mendorong skema pembiayaan KPBU yang lebih masif, penguatan peran SWF LPI, terus memberdayakan SMV di bawah Kementerian Keuangan, pendalaman pasar, serta pengendalian utang yang tetap *prudent*. Pembiayaan masih akan dihadapkan pada tantangan kebutuhan yang tinggi dan volatilitas pasar keuangan, sertaantisipasi tren kenaikan suku bunga global. Target pembiayaan utang akan dipenuhi secara pragmatis, oportunistik, fleksibel dan *prudent* dengan melihat peluang dan diversifikasi pasar, diversifikasi instrumen dan sumber pinjaman baik dari pasar keuangan lokal, global, maupun pemanfaatan pinjaman dari lembaga multilateral dan bilateral. Pemerintah juga harus terus mendorong efektivitas pembiayaan investasi melalui penguatan BUMN sebagai agen pembangunan. BUMN berperan aktif untuk mengakselerasi pencapaian target pembangunan yang dilakukan secara selektif, berdasarkan prioritas yang makin tajam, dengan mempertimbangkan kinerja keuangan, kinerja operasional, dan kesiapan proyek atau program secara teknis.

Kelima, menjaga agar pelaksanaan kebijakan fiskal di tahun 2022 dapat berjalan optimal. Kebijakan fiskal tahun 2022 harus memberikan fondasi yang kokoh untuk konsolidasi fiskal sesuai amanat UU Nomor 2 Tahun 2020.

Pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat,

Untuk mendukung arah kebijakan fiskal tahun 2022 tersebut, Pemerintah telah, sedang, dan akan terus melaksanakan **reformasi perpajakan dan penguatan kualitas hubungan keuangan pusat dan daerah**. Reformasi Perpajakan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program Reformasi Perpajakan yang telah diluncurkan pada tahun 2017 dengan fokus pada penyesuaian sistem perpajakan agar sesuai dengan *best-practices* dan mampu mengantisipasi dinamika faktor sosial-ekonomi dalam jangka menengah-panjang. Reformasi dilakukan untuk

menciptakan sistem perpajakan **yang sehat dan adil**. **Sehat** artinya efektif sebagai instrumen kebijakan, optimal sebagai sumber pendapatan, serta adaptif dengan perubahan struktur dan dinamika perekonomian. **Adil** artinya memberikan kepastian perlakuan pemajakan, mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak, dan menciptakan keseimbangan beban pajak antarkelompok pendapatan dan antarsektor.

Reformasi perpajakan meliputi dua aspek perbaikan: **aspek administratif** dan **aspek kebijakan**. **Reformasi administrasi** meliputi penguatan institusi dan sumber daya manusia, integrasi sistem informasi dan basis data perpajakan, simplifikasi administrasi, penajaman fungsi pengawasan untuk ekstensifikasi-intensifikasi perpajakan, serta penegakan hukum yang berkeadilan. **Reformasi kebijakan**, diarahkan untuk perluasan basis pemajakan dan mencari sumber baru penerimaan. Hal ini dilakukan antara lain dengan penyempurnaan pemungutan PPN dan mengurangi regresivitasnya, penguatan kebijakan pengenaan pajak penghasilan khususnya bagi orang pribadi, serta potensi pengenalan jenis pungutan baru khususnya terkait pemajakan eksternalitas terhadap lingkungan.

Sementara itu, hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah harus terus ditingkatkan kualitasnya, mengingat masih banyaknya permasalahan yang harus dihadapi. Alokasi TKDD telah meningkat secara signifikan dari hanya Rp33,1 triliun di tahun 2000 menjadi Rp795,5 triliun di tahun 2021. Peningkatan alokasi TKDD telah membawa banyak dampak positif, seperti meningkatnya pemerataan kemampuan keuangan antardaerah, meningkatkan akses pendidikan maupun akses kesehatan di daerah. Namun, fakta menunjukkan bahwa pengelolaan Keuangan Daerah masih belum dilakukan secara efisien, efektif, dan disiplin, serta masih terjadi ketimpangan kinerja fiskal antardaerah.

Pada tahun 2019 rasio pajak dan retribusi daerah terhadap PDRB masih rendah (2,65%), porsi belanja pegawai masih tinggi, yaitu rata-rata 34,74% (bahkan di daerah yang tertinggi bisa mencapai 53,9%), porsi belanja modal masih rendah, yaitu rata-rata 20,27% (bahkan yang terendah hanya 7,1%), dan dana Pemerintah Daerah yang disimpan di Perbankan masih sangat tinggi, mencapai rata-rata di kisaran Rp100 triliun pada posisi akhir tahun. Lebih dari itu, capaian output dan outcome nasional masih rendah dan ketimpangan antardaerah masih lebar. Akses air bersih mencapai rata-rata 89.27%, sementara masih ada daerah yang baru mencapai 1,06%.

Perbedaan tingkat kemiskinan antardaerah juga masih tinggi, ada yang sudah mencapai 1,68%, tetapi masih ada pula yang mencapai hingga 43,65%.

Dengan memperhatikan tantangan di atas, maka penting dan mendesak untuk merekonstruksi kembali hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar lebih transparan, akuntabel dan berkeadilan, guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok NKRI. Hubungan keuangan antara pusat dan daerah perlu dibangun antara lain dengan mengembangkan sistem pajak daerah yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien, meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal, mendorong peningkatan kualitas belanja daerah, serta sinergi dan harmonisasi pusat dan daerah dalam menjaga kesinambungan fiskal.

Pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat,

Melalui akselerasi pemulihan ekonomi, reformasi struktural, dan reformasi fiskal, diharapkan kebijakan fiskal tahun 2022 akan efektif, *prudent*, dan *sustainable*. Pendapatan negara akan semakin meningkat ke kisaran 10,18 s.d. 10,44 persen PDB. Belanja negara akan mencapai kisaran 14,69 s.d. 15,30 persen PDB. Keseimbangan primer akan mulai bergerak menuju positif di kisaran -2,31 s.d. -2,65 persen PDB. Defisit akan semakin mengecil ke -4,51 s.d. -4,85 persen PDB. Rasio utang akan tetap terkendali di kisaran 43,76 s.d. 44,28 persen PDB.

Di tengah kondisi pemulihan ini, kita harus tetap optimis dan tidak boleh menyerah. Kita tetap harus berkomitmen untuk menghadirkan pengelolaan fiskal yang sehat dan efektif sehingga dapat menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Akselerasi pertumbuhan ekonomi akan menciptakan kesempatan kerja sehingga tingkat pengangguran terbuka dapat ditekan di kisaran 5,5 – 6,2 persen. Angka kemiskinan akan berada di rentang 8,5 – 9,0 persen. Rasio Gini akan berkisar antara 0,376 – 0,378. Indeks Pembangunan Manusia akan meningkat ke rentang 73,44 – 73,48. Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga ditingkatkan untuk mencapai kisaran masing-masing 102 – 104 dan 102 – 105.

Pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat,

Kami perlu juga sampaikan bahwa Konferensi Tingkat Tinggi G20 bulan November 2020 yang lalu telah memberikan kepercayaan kepada Indonesia untuk memegang Presidensi G20 di tahun 2022. Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022 akan

mengusung tema “*recover together, recover stronger*” untuk memastikan kepemimpinan kolektif global yang kuat dalam pemulihan ekonomi serta kebersamaan untuk keluar dari krisis menuju perekonomian global yang lebih kuat dan tangguh. Tema Presidensi ini ditopang oleh tiga pilar, yaitu peningkatan produktivitas (*promoting productivity*), peningkatan stabilitas dan daya tahan sistem perekonomian dan keuangan global (*increasing resilience and stability*), dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (*ensuring sustainable and inclusive growth*).

Kepercayaan dunia terhadap Indonesia merupakan momentum besar untuk meningkatkan peran dan posisi Indonesia dalam kerja sama internasional. Apalagi mengingat tahun 2022 sangat krusial dalam upaya memulihkan perekonomian global dan memperbaiki kembali fundamental ekonomi untuk mencapai pertumbuhan global yang lebih kuat, seimbang, berkelanjutan dan inklusif.

Pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat,

Demikianlah Pengantar dan Keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2022 yang telah pemerintah susun dengan mempertimbangkan situasi pandemi Covid-19 yang masih menimbulkan ketidakpastian yang tinggi. Selanjutnya pemerintah mengharapkan dukungan, masukan, dan kerja sama seluruh anggota Dewan yang terhormat dalam pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Sungguh bersama kesulitan ada banyak kemudahan”. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan perlindungan-Nya, untuk dapat melewati masa-masa sulit sekarang ini. Semoga kita diberikan kekuatan untuk dapat melaksanakan tugas dan amanah, melayani seluruh rakyat Indonesia dalam upaya menuju bangsa yang berdaulat, maju, adil, dan makmur. Amin.

Wassalamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Jakarta, 20 Mei 2021

Atas Nama Pemerintah Republik Indonesia

Menteri Keuangan,

ttd

Sri Mulyani Indrawati